



RESEARCH ARTICLE

MANAJEMEN SUMBER DAYA SISTEM PENDIDIKAN(PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI DAERAH 3T)

Desi Riyannie

Manuscript Info

Manuscript History

Received: 28 July 2024

Final Accepted: 30 August 2024

Published: September 2024

Abstract

Copyright, IJAR, 2024,. All rights reserved.

Pendahuluan

Bab I

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis termasuk demokratis dalam pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia juga berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adanya demokratisasi pendidikan, maka masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu lembaga pendidikan (sekolah). Meskipun hubungan antara sekolah dan masyarakat demikian erat, masyarakat tidak langsung berperan dalam kegiatan operasional sekolah.

Masyarakat merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan, peran strategis tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20 pasal 54 ayat 1 dan 2 yang menyatakan (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Dasar hukum bagi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pendidikan nasional sangatlah penting, mengingat pemerintah tidak akan sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sektor pendidikan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Hak masyarakat dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di sekolah antara lain adalah ikut berpartisipasi dalam program pendidikan di sekolah mulai dari membuat visi, misi sekolah sampai ikut menentukan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik daerah setempat. Sedangkan kewajiban masyarakat antara lain memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah berupa ikut berpartisipasi memberikan sumber daya yang belum dimiliki oleh sekolah yaitu dapat berupa tenaga, ide pemikiran, pemberian bantuan buku, alat pendidikan, dan dana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 yang berbunyi “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat”.

Berdasarkan dari undang-undang tersebut dapat dianalisis bahwa partisipasi penyelenggaraan dalam masyarakat pendidikan di sekolah dapat berupa perseorangan ataupun kelompok masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Selain itu, masyarakat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan

yaitu sebagai sumber daya manusia yang merupakan *input* pendidikan, dan sebagai pelaksana pendidikan, serta merupakan pengguna dari *output* pendidikan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 1 yang berbunyi, sebagai berikut: “masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah”.

Pada pasal tersebut, masyarakat dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dari membuat perencanaan sampai melakukan evaluasi program kegiatan pendidikan di sekolah, dapat melalui organisasi atau wadah seperti komite sekolah dan dewan pendidikan. Di samping mempunyai kewajiban membiayai pendidikan, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk memikirkan, memberikan masukan, dan membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kewajiban ini sangat perlu dikomunikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat dipahami bersama, sehingga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan semakin besar.

Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam pendidikan berbasis masyarakat sehingga pendidikan tetap memiliki keterkaitan dengan kondisi dan tuntutan masyarakat. Sementara untuk mewadahi peran serta masyarakat dibentuklah satu institusi yang bersifat independen dengan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, sementara untuk tingkat satuan pendidikan dikenal dengan istilah komite sekolah.

Menurut Abdullah (2018) keberhasilan suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi sekolah akan sangat sulit dicapai tanpa adanya keselarasan pandangan antara kepala sekolah, guru dan masyarakat tentang makna pendidikan yang sebenarnya, serta bagaimana seharusnya proses pendidikan di sekolah itu dilaksanakan. Sudah seharusnya pimpinan sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru dan masyarakat bekerjasama secara terpadu dalam mewujudkan setiap cita-cita pendidikan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan moralnya.

Hafidin (2019) menyatakan masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Bila dilihat ruang lingkup masyarakat banyak dijumpai keanekaragaman bentuk dan sifat masyarakat. Justru keanekaragaman inilah dapat memperkaya budaya bangsa Indonesia. Pendidikan dalam masyarakat bertujuan menyejajarkan status kehidupan masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu lingkungan yang mendukung pendidikan seorang individu. Karena di dalam lingkungan masyarakat inilah seorang anak belajar bersosialisasi, dan memperoleh keterampilan. Dalam lingkungan masyarakat dapat diperoleh pengetahuan dan keterampilan sekaligus, dikarenakan di dalam masyarakat terdapat sumber-sumber belajar yang sangat banyak.

Pemerataan pendidikan di pelosok desa memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan, dengan demikian pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan akan memunculkan lebih banyak rencana dan program-program untuk meratakan pendidikan yang ada di Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang pulaunya membentang dari timur ke barat, memberikan sebuah keunikan topografi tersendiri bagi Indonesia. Topografi ini menyebabkan dikenalnya istilah daerah ibukota, pegunungan, pelosok, daerah pesisir, daerah terluar, terpencil, bahkan daerah perbatasan. Masyarakat di wilayah terpencil dan terluar atau di wilayah perbatasan tidak hanya diperhadapkan pada masalah ekonomi, melainkan juga pembangunan yang tidak merata. Hadirnya pembangunan yang tidak merata berimbas pada berbagai aspek, salah satunya pendidikan. Sistem pendidikan di wilayah ini, yakni wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (yang selanjutnya dalam tulisan ini disingkat 3T) cukup memprihatinkan. Beberapa masalah yang sering ditemui di wilayah 3T adalah mutu pendidikan yang rendah, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, pola pikir masyarakat primitif tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan generasi penerus, bahkan kualitas kompetensi tenaga pendidik yang rendah. Ketika beberapa aspek di atas tergolong rendah atau ‘bermasalah’, tentu akan berakibat pada pendidikan itu sendiri.

Dalam makalah ini, penulis juga akan mengangkat studi kasus di daerah 3T mengenai manajemen sumber daya sistem pendidikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu sekolah yang ada dan sangat menarik bagi penulis untuk diangkat.

Problematisa yang dialami Indonesia di bidang pendidikan ini bukanlah masalah sepele yang tidak perlu dikaji lebih lanjut. Setidaknya pemerintah Indonesia telah berupaya agar pemerataan mutu pendidikan pada berbagai daerah bisa terjadi. Harapan agar mutu pendidikan bisa merata ke semua daerah menjadi dambaan semua masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah 3T.

Sistem pendidikan di Indonesia perlu direvitalisasi, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, agar peningkatan mutu pendidikan bisa terjadi, dan dari dalamnya tersedia generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 menuju digitalisasi dan generasi emas tahun 2045.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada makalah ini antara lain:

1. Bagaimana prosedur peningkatan mutu pendidikan di wilayah 3T?
2. Bagaimana strategi revitalisasi pendidikan di wilayah 3T?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu sekolah?
4. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah?

Tujuan

Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah:

1. Mengetahui prosedur peningkatan mutu pendidikan di wilayah 3T.
2. Mengetahui strategi revitalisasi pendidikan di wilayah 3T.
3. Mengetahui peran masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu sekolah.
4. Mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah.

Bab II

Permasalahan

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia secara umum antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran.

Secara garis besar permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sebagai berikut:

1. Sikap guru dan orangtua terhadap kreatifitas, dimana guru lebih menyukai peserta didik dengan kecerdasan tinggi daripada yang rendah. Hal ini kurang memupuk kreatifitas anak (Utami Munandar, 2002, h. 14).
2. Sumber daya pendidikan yang belum cukup andal untuk mendukung tercapainya tujuan dan target pendidikan secara efektif. Sumber daya pendidikan yang mencakup antara lain kinerja mengajar guru, kualitas budaya belajar peserta didik, anggaran pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, masih dipandang lemah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, baik dalam pembentukan keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, keterampilan maupun akhlak mulia di kalangan peserta didik dan guru. Sumber daya pendidikan lebih banyak difokuskan pada urusan administrasi daripada diarahkan pada proses pembelajaran secara utuh, total dan menyeluruh.
3. Sistem pembelajaran lebih banyak menitikberatkan pada kuantitas hasil daripada kualitas proses. Hal ini tercermin dalam semangat penyelenggaraan Ujian Nasional. Para penyelenggara pendidikan lebih memusatkan perhatiannya pada jumlah lulusan daripada memperhatikan kualitas proses pembelajaran. Membahas soal-soal lebih diminati daripada mengkaji dan mengembangkan konsep-konsep dan teori-teori ilmu pengetahuan.
4. Kurikulum, proses pembelajaran, sistem evaluasi masih bersifat parsial terhadap tujuan pendidikan nasional. Kesenjangan antara tujuan nasional dengan hasil belajar dapat dilihat dari tampilan para lulusan yang belum mencerminkan nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional. Hasil belajar belum mencerminkan terbentuknya watak dan karakter bangsa yang bermartabat.
5. Manajemen pendidikan dan kinerja mengajar guru menitikberatkan pada tuntutan administratif daripada menciptakan budaya belajar yang bermutu.
6. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan belum didukung oleh sistem, kultur dan kinerja mengajar, serta budaya belajar secara komprehensif. Secara konseptual standar tersebut dianggap telah mewakili standar kualitas yang diharapkan, namun dalam praktiknya belum didukung oleh sistem, kultur dan kinerja mengajar, serta budaya belajar peserta didik/mahasiswa secara komprehensif.
7. Pendidikan telah dipersempit maknanya menjadi pengajaran. Bahkan pengajaranpun telah dipersempit menjadi proses transfer ilmu yang puncaknya adalah ujian demi ujian. Masalah ini pada gilirannya akan menciptakan kegiatan belajar yang hanyamenekankan pada unsur pengetahuan dengan sistem hapalan. Dari sini ada kesan bahwa standar keberhasilan belajar identik dengan kemampuan mengisi soal-soal, sedang urusan sikap, kepribadian, atau akhlaknya tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan standar prestasi.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Menurut Mulia dan Kurniati (2023) pedesaan merupakan wilayah yang sering kali terabaikan dalam hal pembangunan, baik fisik maupun non-fisik sehingga berkontribusi terhadap disimilaritas pembangunan sektoral, salah satunya sektor pendidikan. Jenjang pendidikan masyarakat pedesaan yang minim, keterbatasan sektor transportasi dan informasi serta ketidakberdayaan desa baik dari segi ekonomi dan sumber daya manusia merupakan sejumlah masalah yang harus dibahas dan dicarikan jalan solusinya.

Proses optimalisasi pendidikan bersifat multifaset serta melibatkan beberapa pelaku kunci, antara lain: orang tua, sekolah serta masyarakat. Hendaknya selain sekolah, masyarakat dan orang tua secara aktif berpartisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka serta memberi mereka dorongan yang berarti dalam pembelajaran. Kolaborasi menciptakan pengaruh konstruktif yang dapat mengoptimalkan proses pembelajaran.

Rira dan Sinding (2023) menyebutkan beberapa penyebab ketidakmerataan mutu pendidikan di Indonesia ialah karena faktor geografis Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya masalah ini. Menurut Halleluddin (2019: 42) menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah menjajaki era modern, yakni era revolusi industri, yang dampak positifnya bisa kita rasakan berupa perkembangan sistem digital dan kecerdasan yang mumpuni pada masyarakat penggunaannya. Dunia bahkan Indonesia telah menginjakkan kaki ke era industri 4.0, yang masyarakatnya menjadi konsumen *Internet of Thinking* (IT), namun IT ialah hal yang riskan atau masih tabu di telinga masyarakat di wilayah 3T. Dalam menghadapi era industri 4.0, perlu untuk menyiapkan pendidikan bagi generasi Indonesia agar mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Ketidakmerataan mutu pendidikan di semua daerah menjadi salah satu penghalang akan harapan tersebut. Sistem pendidikan di Indonesia perlu direvitalisasi, termasuk peran guru dan masyarakat, agar peningkatan mutu pendidikan bisa terjadi, dan dari dalamnya tersedia generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman.

Studi kasus tunggal yang penulis angkat adalah pada SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala terletak di ujung selatan kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah khusus atau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dalam kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan laut Jawa. SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala berada di desa Kiapak kecamatan Kahayan Kuala dengan ibukota kecamatan yaitu Bahaur.

Untuk menuju lokasi SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala hanya bisa menggunakan transportasi air yaitu menggunakan kelotok atau *speedboat*, dari pelabuhan kecamatan Kahayan Kuala menempuh waktu lebih kurang 1,5 jam. Tidak tersedianya sumber mata air tawar menyebabkan sumber air bersih berasal dari air hujan dan air mineral dalam galon yang dijual oleh masyarakat setempat. Belum adanya listrik (PLN) membuat masyarakat tergantung dengan tenaga surya (energi matahari) untuk keperluan kelistrikan. Jaringan signal/internet dari tower WIFI desa bertenaga surya sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah sangat dirasakan manfaatnya untuk digitalisasi dan komunikasi. Tapi kesempatannya adalah desa Kiapak bisa menjadi desa berkembang, dengan adanya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sehingga meningkatkan sumber daya manusia yang ada dan masyarakat beserta guru-guru dapat melakukan inovasi-inovasi dalam bidang kelistrikan serta jaringan.

Rulinting (2018) menyebutkan bahwa masyarakat perkampungan yang selalu dianggap memiliki sikap kolot dan tradisional seolah melekat dengan jati diri mereka, dan berbanding terbalik dengan masyarakat kota yang modern dan selalu menerima perubahan dan perkembangan teknologi. Hal ini menjadi penghambat untuk memajukan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, mereka sangat tabu dan malas untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini. Padahal program dan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat di daerah terpencil bertujuan supaya masyarakat dapat berkembang dan hidup dengan baik.

Bab III

Pembahasan

Pendidikan sebagai salah satu hal yang menjadi penentu taraf dan kualitas hidup masyarakat dalam suatu bangsa karena pembelajaran mempunyai pengaruh besar terhadap peserta didik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, maka dapat dimulai dengan meningkatkan kualitas pendidikan bangsa yang harus dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan dan merata ke semua jenjang pendidikan di manapun. Peran pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi salah satu tolok ukur dalam pembaharuan pendidikan (Allo, 2022). Jika melihat latar belakang Indonesia, yang mana Indonesia memiliki tujuan luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang disebutkan di

atas, namun ketika melihat kembali realitas dan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini yang tidak merata, maka tentu akan berdampak pula pada tujuan pendidikan itu, yang tidak merata.

Wilayah 3T adalah singkatan dari daerah terdepan, terpendak, dan tertinggal. Penggolongan wilayah seperti ini dikarenakan sistem pembangunan yang tidak merata. Wilayah yang masih sangat memerlukan bantuan dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga adanya kebijakan dalam skala nasional lainnya. Dalam Perpres RI nomor 131 tahun 2015 tentang daerah tertinggal tahun 2015-2019, disebutkan dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 1

1. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan tertinggal.

Pasal 2

1. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:
 - a. Perekonomian masyarakat;
 - b. Sumber daya manusia;
 - c. Sarana dan prasarana;
 - d. Kemampuan keuangan daerah;
 - e. Aksesibilitas; dan
 - f. Karakteristik daerah(Presiden, 2015).

Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal memiliki banyak keterbatasan baik fisik infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan lingkungan. Kondisi infrastruktur jalan, penerangan, instalasi-instalasi terkait dengan pelayanan publik yang sangat minimal, atau bahkan belum tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara umum masalah yang dihadapi adalah isolasi wilayah, keterbatasan akses masuk maupun ke luar, fasilitas pelayanan publik yang sangat minimal, sehingga masyarakat kurang sejahtera (Sulistiyani & Yuliani, 2019).

Daerah tertinggal merupakan unit analisis yang menarik untuk dideskripsikan, mengingat pentingnya daerah tertinggal untuk diangkat ke permukaan sehingga mendapat porsi perhatian yang lebih besar. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten dengan karakteristik wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Terdapat beberapa kriteria untuk menetapkan daerah tertinggal menurut regulasi yang sah.

Kriteria daerah tertinggal diatur dalam keputusan menteri PDT nomor 001/KEP/M-PDT/1/2005 terdiri atas 6 kriteria yaitu: 1) Ekonomi, 2) Sumber Daya Manusia, 3) Infrastruktur, 4) Kapasitas Daerah, 5) Aksesibilitas, 6) Karakteristik Daerah(Sulistiyani & Nursam, 2019).

Menurut Syafii (2019) terjadinya kesenjangan di suatu daerah yang menyebabkan daerah tersebut tergolong menjadi wilayah 3T disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor sumber daya manusia.
2. Faktor infrastruktur, menyangkut sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Hal yang tidak kalah penting juga ialah akses menuju sekolah sangat penting untuk diperhatikan karena jika akses menuju sekolah bermasalah maka akan menghambat penyaluran bantuan dari pemerintah daerah karena lokasi sekolah yang sulit untuk dijangkau.
3. Faktor kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, jika dilihat dalam UU nomor 14 tahun 2005 mengenai hak dan kewajiban diantaranya bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan adalah di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapat promosi dan penghargaan, mendapatkan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kompetensi.
4. Faktor pembelajaran yang konvensional, masih banyak sekolah yang menjalankan pendidikan dengan berbagai keterbatasan yang ada karena dipengaruhi oleh ketersediaan dana, sarana dan prasarana, hingga guru yang kurang memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.
5. Jumlah buku yang belum memadai, seperti yang diketahui bahwa buku merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan, dengan adanya banyak buku membuat wawasan peserta didik akan semakin berkembang dan dapat menunjang keberhasilan suatu pendidikan.

6. Banyaknya konflik yang terjadi di berbagai wilayah, akhir-akhir ini bangsa Indonesia bergumul dengan berbagai konflik, baik konflik yang di latar belakang agama, ras, suku bahkan ada konflik yang diakibatkan karena adanya kesenjangan ekonomi, sosial bahkan masalah politik. Sehingga menghambat pembangunan menjadi tertinggal dari daerah non-konflik.
7. Lemahnya kemampuan sistem pendidikan nasional.
8. Anggaran yang dimiliki masih terbatas.
9. Pendidikan yang belum berbasis pada masyarakat dan potensi daerah.

Sutaryo, dkk (2015) menyatakan terjadinya keterbelakangan sosial masyarakat kampung dalam pembangunan karena sulitnya masyarakat menerima budaya modernisasi dan sulit menerima teknologi. Sebagian daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari kota provinsi yang menjadi pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan masyarakat menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Namun di sisi lain, daerah 3T menyimpan keelokan yang sudah tidak dimiliki oleh daerah dengan peradaban yang sangat tinggi, diantaranya kekayaan budaya yang menjadi ciri khas dan keunikan masing-masing daerah. Kearifan lokal dan budaya masih sangat dijunjung di daerah 3T.

SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala terletak di ujung selatan kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah khusus atau daerah 3T dalam kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan laut Jawa. SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala berada di desa Kiapak kecamatan Kahayan Kuala dengan ibukota kecamatan yaitu Bahaur. SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala berdiri sejak tahun 2006 dan memiliki akreditasi C. Desa Kiapak dikelilingi oleh pohon mangrove atau hutan bakau yang memang dilindungi sebagai benteng pertahanan pesisir dari air pasang/banjir, dan tidak boleh ditebang dengan jarak 1 kilometer dari bibir/garis pantai maupun pinggir sungai. Hutan bakau atau mangrove merupakan tempat hidup berbagai binatang yang salah satunya banyak ditemui adalah spesies kera (sesuai sebutan masyarakatnya seperti: bekantan, hiran, monyet ekor panjang dan lain-lain). Akar-akar pohon mangrove juga tempat hidup dan bertelur ikan-ikan, kepiting, kapah, dan beberapa jenis kerang.

Untuk menuju lokasi SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala hanya bisa menggunakan transportasi air yaitu menggunakan kelotok atau *speedboat*, dari pelabuhan kecamatan Kahayan Kuala menempuh waktu lebih kurang 1,5 jam. Mata pencaharian penduduk setempat adalah bekerja sebagai nelayan dan ibu-ibu selain ibu rumah tangga juga sambil berdagang/berjualan.

Banyak tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama guru-guru yang baru bertugas di daerah 3T ini. Tidak tersedianya sumber mata air tawar menyebabkan sumber air bersih berasal dari air hujan dan air mineral dalam galon yang dijual oleh masyarakat setempat. Belum adanya listrik (PLN) membuat masyarakat tergantung dengan tenaga surya (energi matahari) untuk keperluan kelistrikan. Jaringan signal/internet masih sangat terbatas, tapi sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah tersedia tower WIFI Indosat (kartu XL dan Axis) bertenaga surya yang sangat dirasakan manfaatnya untuk digitalisasi dan komunikasi bagi masyarakat. Kesempatannya adalah desa Kiapak bisa menjadi desa berkembang, dengan adanya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sehingga meningkatkan sumber daya manusia yang ada dan masyarakat beserta guru-guru dapat melakukan inovasi-inovasi terutama dalam bidang kelistrikan serta jaringan.

Tantangan yang dihadapi guru-guru di daerah khusus atau 3T sangatlah tidak mudah, apalagi guru-guru berada di luar zona nyaman mereka. Kesehatan mental guru harus selalu diperhatikan, apalagi kesehatan fisik guru. Guru-guru yang mengajar atau bertugas di daerah 3T mempunyai sarana dan prasarana yang terbatas, akses jalan dan transportasi yang terbatas, seperti hanya bisa dikunjungi lewat jalur air, bahkan tidak terdapat listrik apalagi signal HP atau jaringan internet dan karena panggilan tugas juga harus jauh dari keluarga.

Guru juga wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi bersifat holistik (menyeluruh) dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional, ditambah lagi untuk saat ini guru dituntut untuk menguasai teknologi yang berkembang sangat pesat.

Prosedur Peningkatan Mutu Pendidikan di Wilayah 3T

Untuk mengetahui atau mengukur pendidikan yang berkualitas dan bermutu tentunya diperlukan kriteria yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Harus memiliki nilai-nilai moral atau karakter yang tinggi;
2. Peserta didik memiliki nilai ujian yang baik;
3. Diperlukan dukungan orang tua, lingkungan sekitar dan masyarakat;
4. Sumber daya berlimpah;
5. Menenal dunia modern dengan baik;
6. Memiliki tujuan dan visi yang kuat;
7. Memperdulikan dan memberikan perhatian kepada peserta didik;
8. Kurikulum yang relevan dan seimbang.

Penyelenggaraan pendidikan perlu dikelola dengan baik agar kualitas peserta didik meningkat yang akan berdampak positif pada pembangunan nasional. Pengelolaan pendidikan termasuk mutu pendidikan bukan hanya tugas pemerintah saja, melainkan juga dibantu oleh masyarakat, lembaga dan satuan pendidikan. Pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya di wilayah 3T dimaksudkan untuk menjamin akses masyarakat dalam pelayanan pendidikan agar merata, mencukupi, efisien bermutu, terjangkau, berdaya saing, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Setidaknya ada enam alur atau prosedur peningkatan mutu pendidikan yang perlu dilakukan, yakni:

1. Mengidentifikasi permasalahan anak.
Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar Kemendikbudristek memberikan tujuh poin kapan sebuah pendidikan dikatakan dan digolongkan menjadi bagian dari wilayah 3T. Ketujuh poin tersebut menurut Syarifuddin, dkk(2021) sebagai berikut:
 - a. Belum tersedianya layanan pendidikan, yaitu kondisi dimana peserta didik kesulitan mendapatkan informasi layanan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.
 - b. Minimnya akses layanan pendidikan yang biasanya disebabkan oleh letak daerah yang terpencil dan jauh dari pusat, sehingga distribusi layanan pendidikan menjadi tidak merata.
 - c. Tenaga pendidik dan kependidikan yang minim.
 - d. Distribusi guru yang tidak seimbang.
 - e. Tidak sesuai antara kebutuhan dan penyediaan guru. Jumlah guru bukanlah satu-satunya yang menjadi permasalahan, melainkan juga mutu guru. Tak jarang dijumpai guru hanya masuk kelas, membuka dan membaca buku. Padahal tugas seorang guru haruslah sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yakni guru harus mampu mendidik dan mengajar.
 - f. Angka partisipasi sekolah yang rendah. Meskipun program pendidikan Indonesia Wajib Belajar Sembilan Tahun, yang mewajibkan semua peserta didik menempuh pendidikan minimal sembilan tahun, namun tak sedikit dijumpai banyak siswa yang putus sekolah. Persoalan ini banyak dijumpai di wilayah 3T.
 - g. Kualitas sarana prasarana yang kurang memadai.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi pada bagian ini diantaranya ialah(Rustad, 2013):
 - a. Pemenuhan kompetensi dasar.
 - b. Memberikan pengetahuan mengenai potensi sumber daya.
 - c. Memberikan keterampilan hidup dan kemampuan organisasi, komunikasi, manajemen, kerja sama, dan lain-lain.
 - d. Menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam.
 - e. Memberikan pengajaran karakter dan wawasan kebangsaan.
 - f. Membuka dan memudahkan akses layanan pendidikan.
 - g. Menyediakan layanan pendidikan formal dan non-formal.
3. Mengidentifikasi sumber daya pendidikan anak.
4. Merencanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.
5. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan pendidikan anak.
Monitoring dan evaluasi dalam tahap ini didasarkan pada dua prinsip, yakni 1) prinsip transparan, yaitu segala prosesnya terbuka bagi masyarakat, dan 2) prinsip akuntabilitas yaitu prinsip untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan.

Strategi Merevitalisasi Pendidikan di Wilayah 3T

Menurut (Abdulmuid, 2013) dalam upaya meningkatkan dan merevitalisasi mutu pendidikan di wilayah 3T, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:

1. Segala upaya dirancang dan dilakukan sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi setempat.
2. Secara aktif melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, yakni pembelajaran yang menekankan pemecahan masalah (*problem solving*).
3. Materi atau strategi yang dirancang sedapat mungkin berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan peserta didik.
4. Desain kegiatan dimodifikasi sedemikian rupa agar fleksibel, yaitu dapat disesuaikan berdasarkan dinamika sosial.

Pelaksanaan revitalisasi atau peningkatan mutu pendidikan tak hanya dilakukan oleh satu pihak atau lembaga saja, melainkan semua pihak (Syarifuddin, dkk, 2021) yaitu:

1. Peran satuan pendidikan
 - a. Membentuk kerjasama terhadap satu pihak dengan pihak lainnya.
 - b. Melakukan pembinaan kepada peserta didik.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
 - d. Mendukung proses pembelajaran.
2. Peran lembaga pendidikan
 - a. Menerapkan model pembelajaran yang dikondisikan dengan keadaan lokal.
 - b. Menerapkan konsep asimilasi dalam pembelajaran, yakni peserta didik mencoba hal baru berdasar pada pengetahuan yang telah dimilikinya.
 - c. Menerapkan konsep akomodasi dalam pembelajaran, yakni peserta didik memperluas pengetahuan melalui pengalaman-pengalaman mereka.
 - d. Guru harus memberikan dukungan melalui kerjasama antarguru, dan kerjasama guru, orang tua dan masyarakat.
 - e. Guru perlu berkreasi dan berinovasi dalam mengembangkan pelajaran.
 - f. Guru perlu mumpuni dalam penggunaan teknologi.
3. Peran masyarakat
 - a. Mengawasi perkembangan dan proses pembelajaran anak di rumah.
 - b. Menyediakan fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan anak.
 - c. Memberikan *feedback* kepada sekolah mengenai pelaksanaan pendidikan.
 - d. Memberikan usul dan saran untuk perbaikan pendidikan di sekolah.

Peran Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Menurut Huneryear dan Hecman (Maujud, 2017) partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.

Menurut Pidarta (Maujud, 2017) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung percepatan tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Nasution (2010) partisipasi adalah segenap kegiatan dan teknik/kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya.

Partisipasi syarat penting bagi peningkatan mutu pendidikan. Partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama dari pihak sekolah dan masyarakat terhadap visi, misi dan tujuan pendidikan. Jadi, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan kelompok masyarakat dalam membuat keputusan strategis sekolah sehingga bersama semua warga sekolah dapat bekerja sama secara transparan dan bertanggung jawab dalam mengemban visi, misi, dan program sekolah yang diamanatkan oleh masyarakat.

Strategi pelibatan peran masyarakat dalam kegiatan pendidikan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Keterlibatan secara individual, seperti membuka kesempatan dan konsultasi seluas-luasnya bagi orang tua peserta

didik untuk datang ke sekolah/madrasah. 2) Keterlibatan secara organisatoris, yaitu keterlibatan melalui komite sekolah/madrasah, organisasi alumni, dunia usaha/kerja, dan melalui hubungan dengan instansi lain.

Bentuk keterlibatan masyarakat secara organisatoris, misalnya untuk kegiatan pembangunan fisik, orang tua peserta didik yang arsitektur diminta bantuannya membuat desain bangunan, pemusik, pelukis, dramawan, dan olahragawan dilibatkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, praktisi hukum dilibatkan dalam masalah hukum, dan tata tertib serta profesilain yang mendukung kemajuan lembaga pendidikan.

Sekolah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang saling melengkapi bahkan ikut memberikan warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu di pendidikan. Sekolah mempunyai peran dalam proses pelestarian dan pemindahan nilai-nilai kultur pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama yang dianut para guru dan peserta didiknya kepada generasi penerus.

Sekolah harus dibuat lebih relevan dengan lingkungan peserta didik dan pengembangan kurikulum harus sesuai dengan keadaan daerah dan wilayah. Tujuannya agar sekolah tidak terisolasi dengan masyarakat dan harus berorientasi kepada kenyataan kehidupan dan masalah masyarakat. Karena itu hubungan antar sekolah dengan masyarakat yang baik harus menjadi perhatian terus menerus dari setiap kepala sekolah, guru dan stafnya.

Hubungan masyarakat atau yang dikenal dengan “humas” memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Keberhasilan pekerjaan dan tindakan yang dilakukan lembaga pendidikan, segalanya tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan dan tindakan itu. Maka sering dikatakan bahwa “*in a democracy, the succes of anything depends upon public confidence and public understanding*” artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, maka akan memberikan pula pengaruh keberhasilan pengembangan lembaga tersebut.

Hasil penelitian (Arifin, Dermawan dan Habsyi, 2022) keberhasilan peningkatan peran masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui: Pertama, kemitraan untuk meningkatkan akses sumber daya keluarga dan membangun hubungan saling percaya melalui komunikasi terbuka. Kedua, meningkatkan partisipasi anggota keluarga dalam kemitraan sekolah-masyarakat dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mendukung pengembangan kepemimpinan dan menjembatani kesenjangan kekuatan tradisional. Keempat, peran yang lebih berarti keluarga, penghargaan untuk peserta didik, keluarga dan sekolah. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan peran serta masyarakat antara lain: faktor lingkungan dan orang tua. Pola hubungan antara masyarakat dan orang tua dalam kepercayaan (*trust*), dalam hal finansial, akademik, dan evaluasi. Strategi peningkatan peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan: 1) Revitalisasi peran komite. Komite merupakan lembaga yang dapat menjadi penyambung antara misi sekolah dengan kebutuhan masyarakat, komite juga menjadi mediator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan mutu pendidikan, komite memiliki peran dalam memotivasi masyarakat, mendayagunakan potensi masyarakat untuk memberikan bantuan dalam berbagai bentuk kepada sekolah. 2) Pemanfaatan lembaga dan media sosial. Sekolah melakukan terobosan untuk mengembangkan lembaga melalui pendayagunaan potensi yang ada di masyarakat termasuk perkumpulan anak dan remaja, grup-grup media sosial, pemerhati pendidikan, pegiat mutu pendidikan dan perkumpulan pemuda. 3) Peningkatan pendidikan keluarga. Anak usia sekolah lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga dan masyarakat dibandingkan waktu sekolahnya, waktu yang banyak tersebut merupakan waktu penanaman nilai dan pembentukan karakter atau kepribadian anak. Seharusnya pendidikan keluarga sejalan dengan pendidikan anak yang diberikan di sekolah sehingga pengaruh pengalaman baik yang dialami di sekolah sesuai dengan pengalaman kehidupan anak pada lingkungan keluarga.

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Menurut Gaventa dan Valderma (Maujud, 2017) bahwa ada tiga tradisi konsep partisipasi bila dikaitkan dengan praksis pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks ini, lebih membahas tentang partisipasi masyarakat dalam membangun mutu pendidikan disekolah. Partisipasi masyarakat, menekankan pada “partisipasi langsung” warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Beberapa bentuk partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan oleh Baharuddin (Maujud, 2017) sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Komite Sekolah
Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3, komite sekolah menjelaskan bahwa kontribusi komite sekolah antara lain menyangkut: a) Penyusunan perencanaan strategik sekolah/madrasah, yaitu strategi pembangunan sekolah/madrasah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan; b) Penyusunan perencanaan tahunan sekolah/madrasah; c) Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi dan ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah/madrasah; d) Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah/madrasah terutama yang menyangkut fasilitas; e) Mendorong sekolah/madrasah melakukan internal monitoring (*school self assessment*) dan melaporkannya untuk dibahas dalam forum komite sekolah/madrasah; f) Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga eksternal dalam upaya menjaga *quality assurance*; g) Membahas laporan tahunan sekolah/madrasah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah/madrasah.
2. Partisipasi dalam Dewan Pendidikan
Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan adalah sebagai berikut: a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota; b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; c) Menciptakan suasana pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif jenis studi kasus tunggal dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meneliti bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Penelitian ini dilaksanakan 1 tahun. Tempat penelitian adalah SMPNegeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala di desa Kiapak. Penulis melakukan wawancara dan observasi ke lapangan dengan Kepala SMPNegeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala, Kepala Desa Kiapak sekaligus ketua komite SMP, beberapa orangtua peserta didik, peserta didik, dan beberapa orang masyarakat di desa Kiapak. Hasil penelitian adalah bentuk kerjasama berupa partisipasi masyarakat melakukan kegiatan penghijauan berupa penanaman bibit mangrove (bakau) sebagai benteng pertahanan wilayah pesisir dari banjir/erosi dan tanah longsor, pemasangan tower wifi bertenaga surya, peresmian wisata edukasi mangrove (diberi nama “Si Mangki”) masyarakat desa Kiapak, dan pembangunan gedung serba guna di desa Kiapak. Bentuk kerja sama dengan tenaga kesehatan adalah untuk selalu melakukan edukasi sekolah sehat, puskesmas remaja di sekolah, dan senam bersama (senam ibu-ibu PKK, maupun senam prolanis lansia sambil pemeriksaan kesehatan gratis). Perlunya bentuk partisipasi masyarakat yaitu perangkat desa (Kepala Desa) selaku ketua komite sekolah karena warga sekolah terutama guru dan peserta didik bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas atau sarana prasarana yang ada di desa Kiapak untuk meningkatkan dan menunjang proses pembelajaran di sekolah untuk media belajar, sumber belajar, sumber penelitian dan tempat rekreasi. Dengan menjalin kemitraan dan komunikasi yang baik, disertai usaha dan doa maka bentuk kerja sama dengan perangkat desa dan tenaga kesehatan bisa tercapai serta dirasakan manfaatnya sampai saat ini.

Penulis menyatakan bahwa keberhasilan bentuk partisipasi masyarakat di desa Kiapak dalam rangka meningkatkan mutu sekolah di daerah 3T, yang diperoleh sesuai kesepakatan dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut adalah:

1. Terlaksananya kesepakatan dengan hasil maksimal karena sangat dirasakan manfaatnya bagi semua warga sekolah pada SMPNegeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala dan masyarakat di desa Kiapak.
2. Peresmian wisata edukasi mangrove (bakau) “Si Mangki” masyarakat desa Kiapak bulan Januari tahun 2022 sebagai sumber belajar, tempat penelitian, tempat belajar dan rekreasi bagi warga sekolah.
3. Terpasangnya tower wifi kartu XL/AXIS sejak tahun 2022 sangat dirasakan warga sekolah dan masyarakat untuk mempermudah komunikasi dan digitalisasi terutama digitalisasi sekolah sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini.
4. Warga sekolah ikut menggunakan gedung serba guna “Sinar Laut” desa Kiapak sebagai tempat olahraga, tersedianya fasilitas lapangan bulutangkis/badminton, tenis meja, tempat melakukan kegiatan keagamaan dan upacara hari Pramuka serta hari Kemerdekaan RI secara *indoor* (dalam gedung).
5. Terlaksananya program puskesmas remaja di sekolah dengan agenda rutin pemberian pil tambah darah bagi peserta didik perempuan, pengukuran tinggi badan dan berat badan secara berkala bagi peserta didik.
6. Terlaksananya senam bersama masyarakat khususnya ibu-ibu PKK dan lansia serta pemeriksaan kesehatan gratis oleh tenaga kesehatan dari puskesmas pembantu desa Kiapak.

7. Dilakukan monitoring, pemeliharaan dan umpan balik terhadap pelaksanaan program oleh pihak-pihak terkait yang bekerjasama yaitu pemerintah, masyarakat dan semua warga sekolah.
8. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut.

Menurut Figueroa, Lim & Lee (2016) mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah pedesaan yang jarang penduduknya dan memiliki fasilitas dasar memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dengan fasilitas yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas dasar penting bagi sekolah-sekolah yang letaknya jauh. Karena dampaknya terhadap prestasi akademik bervariasi tergantung pada infrastruktur sosial dan ekonomi, penyediaan fasilitas sekolah harus didasarkan pada kebutuhan unik setiap komunitas. Pendekatan desentralisasi bermanfaat bagi pengelolaan fasilitas sekolah di Filipina dimana sumber daya pendidikan terbatas.

Pendapat di atas memperkuat penelitian penulis bahwa SMP Negeri Satu Atap 1 Kahayan Kuala juga dapat berprestasi. Bentuk prestasi yang diperoleh SMPNegeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala, salah satunya adalah pada hari Sabtu, 3 Juni 2023 pada kegiatan *School Meeting* tahun 2023 se-kabupaten Pulang Pisau, untuk tingkat pelajar SMP, peserta didik dibidang olahraga berhasil mendapatkan prestasi sebagai juara 1 pada cabang badminton/bulutangkis putra dan meraih juara 2 pada cabang tenis meja putra. Peserta didik sangat senang dan gembira karena berhasil mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah walaupun berada di daerah terpencil atau 3T, bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. SMPNegeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala juga memperoleh BOS (Biaya Operasional Sekolah) Kinerja pada tahun 2023 ini. Kemudian bulan Mei 2024 pada kegiatan *School Meeting* tahun 2024 se-kabupaten Pulang Pisau berhasil mempertahankan prestasi sebagai juara 1 pada cabang badminton/bulutangkis putra.

Pada tanggal 11 dan 12 September 2024 SMPNegeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala, walaupun tidak mempunyai listrik dari PLN, tetapi secara kreatif dan inovatif, berani dan mampu melaksanakan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) secara mandiri dan *full-online* menggunakan tenaga surya dan genset dengan lancar.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di desa Kiapak dalam rangka meningkatkan mutu sekolah di SMPNegeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala yang termasuk daerah 3T, yang diperoleh sesuai kesepakatan dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama adalah berhasil dan mengalami kemajuan dalam peningkatan mutu di sekolah.

Bab IV

Kesimpulan

Ada enam alur atau prosedur peningkatan mutu pendidikan yang perlu dilakukan di wilayah 3T, yakni:

1. Mengidentifikasi permasalahan anak.
2. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak.
3. Mengidentifikasi sumber daya pendidikan anak.
4. Merencanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.
5. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan pendidikan anak.

Pelaksanaan revitalisasi atau peningkatan mutu pendidikan tak hanya dilakukan oleh satu pihak atau lembaga saja, melainkan semua pihak.

Strategi pelibatan peran masyarakat dalam kegiatan pendidikan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Keterlibatan secara individual, seperti membuka kesempatan dan konsultasi seluas-luasnya bagi orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah/madrasah. 2) Keterlibatan secara organisatoris, yaitu keterlibatan melalui komite sekolah/madrasah, organisasi alumni, dunia usaha/kerja, dan melalui hubungan dengan instansi lain.

Beberapa bentuk partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam Komite Sekolah; dan 2) Partisipasi dalam Dewan Pendidikan.

Bentuk partisipasi masyarakat di desa Kiapak dalam rangka meningkatkan mutu sekolah di SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala yang termasuk daerah 3T, yang diperoleh sesuai kesepakatan dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama adalah berhasil dan mengalami kemajuan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Bab V**Saran-Saran**

Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan revitalisasi atau peningkatan mutu pendidikan tak hanya dilakukan oleh satu pihak atau lembaga saja, melainkan semua pihak termasuk peningkatan peran serta masyarakat.

Dalam menjalankan upaya pemerataan pendidikan, penting juga untuk memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik yang berkualitas. Diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga pendidik untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik.

Untuk menyamakan tingkat pendidikan di wilayah 3T, pemerintah harus merancang rencana yang lengkap dan terpadu. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah memperbaiki infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, jalan dan jembatan, dan akses listrik dan air bersih. Pemerintah juga dapat membangun sekolah baru di daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan. Perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, seperti pembangunan gedung sekolah, jalan dan jembatan yang rusak, serta akses listrik dan air bersih, merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan peserta didik di daerah tersebut dapat mengakses pendidikan dengan baik. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan untuk membangun sekolah baru di daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru di daerah terpencil juga sangat penting.

Secara keseluruhan, pemerintah perlu merancang rencana yang terintegrasi dan holistik dalam upaya meratakan pendidikan di daerah terpencil. Melalui berbagai tindakan yang saling terkait, diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan memastikan bahwa peserta didik di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Daftar Pustaka

1. Abdullah, M. (2018). Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru, dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan, LPPM Universitas Pendidikan Indonesia*, Vol. 17, No. 3, Hal. 190-198.
2. Abdulmuid, M. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Batang: Penggung Mangkunegara.
3. Allo, W. B. (2022). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Apokalupsis*, 13(1), 19-39.
4. Arifin, B, Dermawan, A, dan Habsyi, I. (2022). Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan (Kajian Pada Sekolah Menengah: SMPN 1 Malang, SMPN 10 Malang, SMP Plus Al Kaustar). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 2, No. 2, Juni 2022.
5. Díez, F., Villa, A., Lopez, A. L., & Iraurgi, I. (2020). Impact of Quality Management Systems in The Performance of Educational Centers. *Educational Policies and Management Processes*. *Heliyon*, 6(4).
6. Figueroa, L.L., Lim, S., & Lee, J. (2016). Investigating the Relationship Between School Facilities and Academic Achievements Through Geographically Weighted Regression. *Annals of GIS*, 22(4), 273-285.
7. Hafidin. (2019). Peran Serta Orang Tua dan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Untuk Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas. *Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang*, Vol. 4, No. 1, 2019.
8. Ibrohim, I., Mansyur, A. S., Syah, M., & Ruswandi, U. (2021). Educational Innovation in Developing Quality Management Muhammadiyah Best Elementary School BANDUNG. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 9-24.
9. Jannah, M., & Diana, E. (2022). Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah Melalui Partisipasi Masyarakat. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 4(2), 41-57.
10. Jabbar, M. N., & Hussin, F. (2019). Quality Management as a Strategic Tool to Enhance the Relationship between Leaders' Behavior and Lecturers' Job Satisfaction. *International Journal of Higher Education*, 8(3), 36-46.
11. Junaedi, Y., & Rahminawati, N. (2022). Implementation of Internal Quality Assurance System in Elementary Schools (Case Studies in Bandung). *Media and Education in the Digital Era* (pp. 385-390). Routledge.
12. Mulia, P. S, dan Kurniati, E. (2023). Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Pedesaan Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 7, Issue 3, Hal. 3663-3674.

13. Nugroho, Riadi. (2013). Proses Perbaikan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Sekolah Unggul di SMK Negeri 3 Pati. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 23 (1), 42-58.
14. Nurzannah, N., Ginting, N., & Setiawan, H. R. (2020). Implementation of Integrated Quality Management in The Islamic Education System. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1 (1).
15. Presiden, P. (2015). PerPres RI Nomor 131 Tahun 2015-2019 Tentang Daerah Tertinggal. Peraturan Presiden.
16. Rahman, K. A. (2012). Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 227-246.
17. Rira, P., dan Sinding, R.R. (2023). Revitalisasi Mutu Pendidikan di Wilayah 3T. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, Vol. 1, No. 2, Juli 2023, Hal. 354-363.
18. Rujiah dan Sa'adiyah Maemunah. (2021). Peran Stakeholder Pendidikan sebagai Penjamin Mutu Sekolah PAUD di TKQ Baitul Izzah. *Jurnal Ilmu Islam*. 5 (2). 636-652.
19. Rulinting, N. (2018). Meningkatkan Mutu Pendidik PAUD di Daerah 3T Dengan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Teknologi. *SENDIKA: Seminar Nasional Pendidikan FKIP UAD*. ISSN: 2598-6481, Vol. 2, No. 1, Hal. 298-302.
20. Rustad, S. (2013). Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal: Menempa Diri Demi Ibu Pertiwi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
21. Sabariah, S. (2022). Manajemen Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 116-122.
22. Sukadari, M. H., Perianto, E., & Haryanto, E. S. (2021). Improving Education Quality of Elementary School in Indonesia: An Empirical Research. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(4).
23. Sulistiyani, A. T., & Nursam. (2019). Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Daerah Tertinggal. Kementerian Desa PDT Transmigrasi.
24. Sulistiyani, A. T., & Yuliani, K. (2019). Potensi Lokasi dari Lubuk Daerah Tertinggal: Inovasi Tenun Ikat Rote Ndao dan Alor. *Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi*.
25. Sunaengsih, C. (2016). Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Mutu Pembelajaran pada Sekolah Dasar Terakreditasi A. *Jurnal: Jurnal Pendidikan UPI*. 3(2). 183-190.
26. Suriansyah, A. (2014). Hubungan Budaya Sekolah, Komunikasi, dan Komitmen Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal: Cakrawala Pendidikan*.
27. Suriansyah, A. (2017). Implementation of The Total Quality Management Model to Support Quality of Work Cultures at Primary School Teacher Education Programs in Lambung Mangkurat University Indonesia. *Jurnal: Australian Journal of Basic and Applied Sciencies*. 11 (9). 179-186.
28. Sutaryo, dkk. (2015). Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). *Kumpulan Makalah Call For Papers Kongres Pancasila VII*. ISBN: 978-602-7918-0504.
29. Syafii, A. (2019). Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 4 (2), Hal. 153-171.
30. Syarifuddin, M. A., Mardianto, A., & Maknun, J. (2021). Pendidikan Bagi Anak di Daerah 3T (1 ed.). Direktorat Sekolah Dasar - Kemendikbudristek.
31. Toharudin, M., & Ghufroni, G. (2019). Leadership of The Headmaster in Managing Inclusive Elementary School in Brebes Regency. *Educational Management*, 8(2), 173-182.